

KEGIATAN DPR-RI PERTENGAHAN KEDUA DESEMBER 2011

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Kegiatan minggu ini terfokus pada Rapat Paripurna DPR-RI penutupan Masa Sidang II 2011-2012. Sebagaimana telah dilaporkan di Buletin Parlemenaria minggu lalu, agenda Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II 2011-2012 adalah laporan Pansus RUU tentang Pengadaan Tanah, laporan Baleg tentang Penetapan Prolegnas 2012, Laporan Tim Pengawas Kasus Bank Century, dan Pidato Penutupan Masa Sidang II. Untuk laporan kegiatan Dewan minggu ini, berikut ringkasan Pidato Penutupan Masa Sidang II:

Masa Sidang II 2011-2012 telah dimulai sejak tanggal 14 November, dan mulai 17 Desember, Dewan memasuki masa reses hingga tanggal 8 Januari 2012. Fokus Dewan Masa Sidang II tetap pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penetapan pejabat publik telah dilakukan melalui *fit and proper test* oleh komisi-komisi terkait dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Penetapan pejabat publik dimaksud adalah 5 (lima) anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI, 4 (empat) pimpinan KPK, 2 (dua) deputi Gubernur Bank Indonesia, 9 (sembilan) anggota Komite BPH-Migas.

Legislasi

Pada Masa Sidang II 2011-2012 ada 3 (tiga) RUU yang telah dapat diselesaikan. Yaitu RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)*/Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, dan RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Adapun RUU Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak berlanjut menjadi RUU baru, karena Pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk tidak melakukan perubahan. Ada 7 (tujuh) RUU yang telah disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Berkaitan dengan banyaknya RUU yang belum selesai



dibahas pada tahun 2011, Pimpinan Dewan mengharapkan agar bisa dituntaskan pada Masa Sidang yang akan datang. Tahun 2012, Badan Legislasi melalui persetujuan paripurna telah menetapkan 64 (enam puluh empat) RUU sebagai prioritas, 20 (duapuluh) diantaranya sudah dalam pembicaraan tingkat I, 44 (empat puluh empat) sisanya adalah RUU usul inisiatif DPR dan dari Pemerintah. (Catatan: semula 66 RUU, tetapi RUU tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan RUU tentang perubahan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat di drop).

Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran, ditekankan pada kegiatan Badan Anggaran dalam melakukan pendalaman terhadap APBN 2012. Sedangkan evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2011 dilakukan oleh komisi-komisi DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Dewan terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global, khususnya perkembangan sektor keuangan dan moneter di kawasan Eropa. Isu-isu mengenai lambatny penyerapan anggaran negara tahun 2011, juga menjadi perhatian Dewan. Dewan meminta kepada Pemerintah agar terus memperbaiki sistem penganggaran, termasuk sistem pembiayaan, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek dan kegiatan dalam pos Belanja Pembangunan (Belanja Modal) pada APBN Tahun Anggaran 2012, seperti proyek-proyek infrastruktur.

Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kegiatan Dewan diisi dengan finalisasi atas laporan kegiatan tim-tim pengawas yang telah dibentuk oleh Dewan. Tim-tim tersebut

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnu Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO**: Rizka Arinindya **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

antara lain 3 (tiga) Tim Pengawas Bencana Alam di 3 (Tiga) Provinsi, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas DPR-RI terhadap Kasus Bank Century dan Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi. Semua tim ini telah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPR.

Mengenai Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, telah dilakukan rapat kerja gabungan Komisi Dewan dengan Pemerintah dan RDPU Komisi I dengan elemen masyarakat Papua. Kebijakan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat harus sesuai dengan kebijakan dasar yang mengacu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu Papua harus tetap dalam wilayah NKRI, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua harus menjadi wahana untuk kesuksesan dan kemajuan pembangunan Papua, dan Otonomi Khusus Papua harus dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan.

Kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini baik yang terjadi di Papua terhadap aparat Kepolisian oleh kelompok bersenjata (OPM) dan pembunuhan/pembantaian petani di Mesuji, Lampung dan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sangat memprihatinkan dan melanggar nilai – nilai kemanusiaan dan melanggar HAM. “Tumpang tindih” kepemilikan lahan dan perebutan lahan antara warga dengan investor telah menjadi pemicu sengketa. Terhadap pengaduan ini, Komisi III akan melakukan tindak lanjut, mengunjungi lokasi dan mendapatkan keterangan atas kasus ini. Kita meminta kepada aparat Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan yang diperuntukkan bagi investor yang tidak memperhatikan prinsip keadilan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kasus Bank Century sebagaimana dilaporkan, disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh KPK belum mencapai hasil yang berarti, dan masih terjadi perbedaan pandangan tim pengawas/rekomendasi DPR dengan pandangan KPK. Dalam pelaksanaan proses penelusuran aliran dana, belum secara tuntas diselesaikan oleh BPK. Terdapat banyak hambatan teknis dalam pelaksanaan audit forensik, sehingga BPK membutuhkan waktu yang lebih dari yang telah ditetapkan.

Tim Pengawas DPR-RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji 2011, menemukan setidaknya 8 (delapan) masalah dalam penyelenggaraan haji yaitu: pelayanan pemondokan, katering, transportasi, kesehatan, keamanan, jemaah haji non-kuota, bimbingan haji, dan pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji. Jalan terbaik untuk memperbaiki penyelenggaraan haji adalah dengan melakukan revisi terhadap UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Revisi ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji yang makin baik dan profesional.

Atas keberhasilan Sea Games ke-26 di Palembang dan

Jakarta, Dewan menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial yang telah mengharumkan nama Indonesia. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Pemda Sumatera Selatan, Pemda DKI Jakarta dan pihak-pihak lain, terutama kepada Kemenegpora, KONI dan segenap jajarannya yang telah bekerja keras untuk suksesnya Sea Games ke 26.

Keberhasilan penyelenggaraan KTT-ASEAN di Bali telah diapresiasi Dewan dan masyarakat Indonesia. KTT-ASEAN yang diiringi dengan KTT terkait lainnya seperti KTT Asia Timur menunjukkan bahwa ASEAN memiliki posisi penting dalam konstelasi politik regional maupun internasional. Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang dan tidak kehilangan momentum, karena dunia telah benar-benar mengakui pentingnya ASEAN sebagai bagian dari perekonomian global.

Pimpinan Dewan mengucapkan **Selamat Natal bagi umat Kristiani, serta Selamat Tahun Baru 2012**. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua di tahun yang baru nanti. Amien.

Kegiatan Lain

Dalam rangka penyelenggaraan Konferensi PUIK ke-7 di Palembang 24-31 Januari 2012, Ketua DPR didampingi Tim BKSAP DPR-RI telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Palembang. Tujuan utama kehadiran ketua DPR-RI di Palembang adalah memberikan sosialisasi dihadapan mahasiswa dan masyarakat lain tentang Konferensi PUIK ke-7, dimana Ketua DPR-RI menjadi Presiden Konferensi yang akan memimpin jalannya Konferensi PUIK tersebut. Pemda dan elemen masyarakat Palembang perlu mengetahui dan mengenal PUIK dan peranannya selama ini, dalam rangka memberi kontribusi terhadap penyelesaian berbagai masalah internasional yang menjadi kepentingan bersama. Penyelenggaraan Konferensi PUIK di Palembang, secara politis memberikan keuntungan bagi Indonesia. Apalagi baru untuk pertama kalinya Konferensi PUIK tersebut diselenggarakan di regional Asia Tenggara.*



Ketika Sulit Mencari Keteladanan, Munculkan dari Diri Sendiri

Bangsa Indonesia perlu langkah terobosan untuk bangkit dan maju dalam memenangkan persaingan di era globalisasi. Kemandirian anak bangsa untuk meraih keberhasilan itu sangat diperlukan ketika keteladanan dari para pemimpin dan tokoh publik semakin sulit ditemukan, karena bangsa ini memang telah kehilangan keteladanan. Namun dibalik tantangan itu ada jalan apabila setiap anak bangsa meyakini dirinya adalah teladan.



Ketua DPR RI Marzuki Ali saat mengikuti kegiatan Jalan Sehat ESQ di Benteng Kuto Besak, Palembang.

“Kita semua perlu keteladanan, tetapi faktanya bangsa ini sudah kehilangan keteladanan. Sekarang mari kita tunjukkan keteladanan itu mulai dari diri kita sendiri. Kita pasti punya kejujuran, bertanggung jawab, punya visi, punya mimpi, tetapkan tujuan untuk mencapai mimpi itu. Kerjasama yang bagus, jiwa yang adil dan peduli terhadap sesama. Jadikan itu sebagai dasar kita menjalankan kehidupan sehari-hari,” kata Ketua DPR RI, Marzuki Ali saat menyampaikan pidato membuka kegiatan Jalan Sehat ESQ di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumsel, Minggu (18/12/11).

Ia mengagui keteladanan memang mudah diucapkan namun sulit dilak-

sanakan. “Dari pada menunggu sesuatu yang belum tahu kapan datangnya, lebih baik mencoba melakukan sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita,” imbuhnya. Tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menghasilkan keteladanan atau memikirkan sesuatu yang rumit. Mulailah dengan hal sederhana misalnya datang tepat pada waktunya.

Marzuki memberi contoh kegiatan Jalan Sehat ESQ (Emotional Spiritual Quotient) yang berlangsung di tepian Sungai Musi, tidak jauh dari Benteng Kuto Besak. Dari 20ribu peserta yang hadir tidak banyak yang bisa datang tepat waktu sesuai undangan panitia pukul 06.00 WIB. Sebagai alumni pela-

tihan ESQ ia mencoba menerapkan prinsip 7 Budi Utama, salah satunya disiplin.

Dari pantauan Parle, Ketua DPR terlihat hadir di acara tersebut 10 menit lebih awal, mendahului pejabat pemda yang juga diundang. Kesempatan itu digunakannya untuk berdialog dengan masyarakat dan sebagian memanfaatkannya untuk foto bersama. Bagi politisi Partai Demokrat ini tujuan besar ESQ, mewujudkan Indonesia Emas 2020 baru berhasil dengan langkah maju kedepan sekecil apapun itu.

Sementara itu pendiri dan motivator ESQ Ary Ginanjar Agustian secara khusus menyapa peserta Jalan Sehat yang sebagian besar diikuti oleh pemuda pemudi Sumsel bahkan juga dari provinsi lain. Ia menyebut pemudalah yang punya spirit perubahan. Berkumpulnya pemuda bisa menjadi ciri akan hadirnya peradaban baru. “Nabi Muhammad SAW juga didukung sahabat, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali yang saat itu adalah pemuda yang gigih berjuang,” jelasnya. Ia berkeyakinan semangat para pemuda-lah yang mampu mengembalikan kejayaan Sriwijaya yang pernah berjaya sampai Selat Malaka bahkan sampai Venesia, Italia.

“Hari ini kita berkumpul di tepi Sungai Musi bersama dengan pemuda pemudi, yang didalam hatinya ada spirit Indonesia Emas, yang di dalam jiwanya ada semangat kebangkitan. Jangan pernah padam semangat yang membara dalam hati pemuda,” katanya bersemangat. Ia berharap pesan 7 Budi Utama ESQ yaitu, Jujur, Tanggung Jawab, Vioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli dapat menjadi bagian dari karakter pemuda dan bangsa yang kemudian mengantarkan menuju Indonesia yang lebih baik. (iky) foto:ik/parle

Peninjauan Komisi VII DPR ke PT. IAI disambut Demo

Kunjungan Lapangan (Kunlap) Komisi VII DPR ke PT. Intech Anugrah Indonesia (IAI), Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blk 21A No.8 Semarang disambut demo eks karyawan PT. IAI yang meminta kejelasan nasibnya. Pasalnya, kurang lebih selama 3 tahun mereka tidak bekerja diakibatkan adanya peraturan pemerintah yang menghentikan impor monitor bekas.

“Kita meminta kepada pemerintah agar dibuka kembali kran impor monitor bekas, kami ingin bekerja, kapan kami dipekerjakan lagi, dan tolong Komisi VII DPR perjuangkan nasib kami yang sudah 3 tahun kami merana,” ungkap para pendemo dihadapan tim Komisi VII.

Menjawab hal tersebut, Anggota tim Komisi VII, Asfihani (F-PD) meminta para pendemo bersabar dan tenang. Kunjungan Komisi VII datang kesini untuk mencari jalan keluarnya yang paling baik. “Jadi saya minta saudara-saudara tenang dan jangan berbuat anarkis, itu permintaan saya,” ujar Asfihani dengan tegas.

Dihadapan para pendemo, dia mengatakan, persoalan ini akan kita carikan solusi yang terbaik sehingga saudara-saudara dapat bekerja kembali, karena aspirasi saudara-saudara akan kami perjuangkan di pusat, kata Asfihani seraya menambahkan “setujuuu...!!!!” Dengan serentak para pendemo menyerukan suaranya “setujuuuuuuuuu...!!!!” Untuk itu, lanjutnya, saya minta 3 orang perwakilan dari pendemo untuk mengikuti pertemuan antara Komisi VII DPR dengan PT. IAI.

Sementara Deputi IV dari Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman mengatakan, pemerintah pusat sudah bekerja untuk mencari jalan keluarnya dari bagaimana pengaturan-pengaturannya. Dalam hal ini, lanjutnya, bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja tapi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga Kementerian Menko Eku yang bekerjasama untuk mencari jalan keluarnya.

Alhamdulillah, dengan adanya penjelasan dari anggota tim Komisi VII DPR dan Deputi Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya para pendemo



Tim komisi VII Asfihani saat menemui para pendemo eks karyawan PT IAI



membubarkan diri yang dikawal ketat oleh kepolisian setempat.

Kunjungan komisi VII DPR dipimpin oleh ketua tim Sutan Sukarnotomo (F-PD) dan sejumlah anggota lintas fraksi.

Yakni Asfihani, dan Heriyanto dari F-PD; Markum Singodimedjo dari F-PG; Muhammad Syafrudin, ST dari F-PAN; dan M. Ali Kastella dari F-Partai Hanura. (iw) foto:iw/parle.

Pemda Babel Minta Komisi X DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Bandara Internasional

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung (Pemda Babel) meminta bantuan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk membangun Bandara Internasional di Babel yang merupakan destinasi wisata unggulan internasional setelah Bali dan Lombok.



Tim Kunjungan Komisi X DPR saat di Babel dalam rangka peninjauan destinasi pariwisata Provinsi Babel.

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Babel Imam Mardi Nugroho dihadapan Tim Kunjungan Komisi X DPR RI dan stakeholder kepariwisataan Babel, di Pangkal Pinang, beberapa hari lalu.

Tim kunjungan Komisi X DPR RI dalam rangka peninjauan destinasi pariwisata Provinsi Babel dipimpin Utut Adianto (Wakil Ketua Komisi X dari F-PDIP) dengan anggota Mahyuddin (Ketua Komisi X dari F-PD), Muslim (F-PD), Oelfah A. Harmanto (F-PG), Itet Trijajati Sumarijanto (F-PDIP), Raihan Iskandar (F-PKS), Nasrullah (F-PAN), Mahmud Yunus (F-PPP).

Kami mengharapkan Komisi X DPR RI dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun bandara internasional sekaligus membuka rute penerbangan Garuda dari Jakarta tujuan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung,” ujar Imam.

Imam menyatakan bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan Babel

menjadi destinasi berkelas dunia, masih diperlukan banyak hal, seperti peningkatan aksesibilitas antara lain mengembangkan bandara yang ada menjadi bandara internasional, peningkatan infrastruktur serta peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Saat ini menurut Imam, Bandara H. as Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung belum bisa didarati pesawat berbadan lebar. Secara berkala sudah ada beberapa maskapai penerbangan swasta yang sudah membuka rute penerbangan ke Belitung. Namun untuk mendukung program pariwisata diharapkan intensitas penerbangan dari Jakarta tujuan Belitung semakin meningkat jika Garuda juga terbang ke Belitung.

Ia menginformasikan, bahwa pada 2009 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik telah menandatangani Peraturan Nomor PM.33/UM.001/

MKP/2009 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan, termasuk di dalamnya Provinsi Babel.

“Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut dan sesuai RPJMD Tahun 2007-2012 Pemprov Babel membuat dan melaksanakan program sektor kepariwisataan “Visit Babel Archipelago 2010” dan “Sail Wakatobi Belitung 2011”,” ujarnya.

Menurut dia, kedua program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan kepariwisataan, investasi di bidang perhotelan, rumah makan, tempat hiburan, perbaikan dan penambahan sarana transportasi darat, laut dan udara serta membangkitkan aktivitas kepariwisataan di tiap kabupaten/kota.

“Wisatawan mulai berdatangan baik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara sehingga kemajuan pembangunan pariwisata semakin meningkat,” imbuhnya. (sc) foto:sc

Pokja Wartawan DPRD Jatim Studi Banding ke DPR

22 orang wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan yang biasa melakukan tugas jurnalistik di Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya melakukan kunjungan studi banding ke Gedung DPR RI.

Mereka ingin mengetahui bagaimana dinamika kerja para awak media melakukan tugas peliputan kegiatan wakil rakyat di Senayan, serta hubungan kerja wartawan dengan jajaran birokrasi Setjen DPR RI.

“Ternyata wartawan peliput disini banyak sekali ya, 100 orang lebih. Kami ingin tahu bagaimana teman-teman wartawan di DPR RI bekerja, mengatur peliputan di gedung wakil rakyat,” kata Hidayat wartawan harian Memorandum, Surabaya setelah mendapat penjelasan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekjen DPR RI Djaka Dwi Winarko dalam pertemuan di ruang wartawan Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/11).

Djaka juga memaparkan tantangan kerja sebagai birokrasi bekerja sama dengan wartawan yang kadang dianggap sebagai entitas merdeka. “Kata kuncinya komunikasi, yang penting saling memahami. Dalam kebijakan berita kami tidak pernah ikut campur, hanya meminta wartawan untuk melakukan

cover both side, bahkan kalau bisa cover all side. Mengkritik boleh tapi dalam konteks membangun kelembagaan DPR ini,” ujarnya.

Secara berkala dua kali dalam setahun tambahannya kesekjenan melakukan kegiatan pembekalan kepada wartawan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi DPR. Persiapan dan pelaksanaannya selalu melibatkan pengurus koordinatariat, terutama menyangkut bahasan yang diperlukan wartawan dalam kegiatan yang disebut press gathering tersebut.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Ketua Koordinatariat Wartawan Parlemen MPR/DPR/DPD, Gusti Lesek serta beberapa anggota koordinatariat dari beberapa media. Ia menjelaskan hubungan kerja wartawan yang berasal dari berbagai media cetak dan elektronik ini secara formal sudah diatur dalam tata tertib yang disusun dan ditetapkan bersama. “Kita sudah punya Tata Tertib Wartawan Koordinatariat Parlemen, aturan dari kita, oleh kita dan untuk kita wartawan yang meliput di Gedung DPR, MPR dan DPD.

Jadi kalau ada apa-apa kita kembali ke Tatib saja,” tekannya.

Ari dari Radio Mercury Surabaya dan Siti dari Harian Birawa menanyakan tentang diskusi yang dikelola wartawan parlemen yang sering menjadi pemberitaan media. “Saya ingin tahu lebih jauh tentang pengelolaan diskusi mingguan yang dilaksanakan. Kami juga ingin mencobanya di Surabaya.”

Gusti yang juga wartawan harian Suara Pembaruan ini menyebut diskusi Dialektika Demokrasi merupakan agenda wajib wartawan DPR setiap minggunya. “Kita laksanakan setiap hari Kamis, dua hari sebelumnya kita sudah menghimpun masukan dari teman-teman wartawan lewat milis. Tema yang paling banyak diusulkan itulah yang kita usung dalam diskusi,” jelasnya.

Ia juga menyebut pihak kesekjenan membantu menyediakan honor terutama bagi nara sumber yang kita undang dari luar seperti akademisi dari perguruan tinggi atau LSM. “Kita bebas mengelola diskusi ini, tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan kita bebas mengkritisi Ketua DPR,” demikian Gusti. (iky)



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekjen DPR RI Djaka Dwi Winarko (tengah) bertemu dengan Pokja Wartawan DPRD Jatim saat Studi Banding ke DPR

Perlemen Remaja Pembelajaran Politik Demokrasi Indonesia

Mahasiswa dari 21 Universitas di seluruh Indonesia, beruntung mendapat kesempatan menjadi peserta Parlemen Remaja yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai ajang pembelajaran untuk mengenal lebih dalam tentang hakekat kebangsaan, politik dan penerapan demokrasi di Indonesia.

Parlemen Remaja Tingkat Mahasiswa 2011 mengusung tema “Rekonstruksi Fungsi Parlemen Melalui Generasi Muda” dan mengangkat topik: “Pembahasan RUU Intelektual Negara”, “Pembahasan Kebijakan Anggaran Pendidikan” serta “Evaluasi Anggaran Lebaran 2011” sebagai tema Simulasi Parlemen Remaja.

Ketua Panitia Parlemen Remaja 2011 Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menjelaskan kegiatan Parlemen Remaja dapat mengenalkan kepada mahasiswa tentang Tugas, Fungsi dan Peran DPR RI dalam Perwujudan Demokrasi di negara kita Indonesia, “Materi yang diberikan bukan hanya dari segi teori namun juga dalam praktek,” katanya.

Dalam sebuah negara, pendidikan kebangsaan penting karena dalam berbangsa dan bernegara selalu ada dinamika sosial dan politik. “Pengembangan pendidikan kebangsaan bukan hanya untuk membangun generasi baru yang cinta bangsa, namun juga bagaimana mendidik agar generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan tong-

kat estafet perjuangan bangsa dalam kehidupan berpolitik, memahami praktik politik beretika,” papar Djaka Dwi Winarko.

Dalam kerangka pendidikan politik tersebut, DPR RI sebagai lembaga negara yang merupakan perwujudan dari perwakilan rakyat, menyambut baik amanat Asosiasi Parlemen Dunia (IPU) untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja, dimana kegiatan Parlemen Remaja kali ini diselenggarakan dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang politik dan demokrasi kepada mahasiswa, mengenalkan mengenai tugas dan peran DPR dalam perwujudan demokrasi di Indonesia, serta melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang lebih matang untuk duduk di parlemen.

Hal senada dijelaskan Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Shaleh, bahwa Dinamika politik menuntut adanya pemahaman tentang demokrasi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya seperti keberadaan parlemen, kebebasan menyampaikan pendapat, serta partisipasi masyarakat.

Pendidikan politik bagi generasi muda sangat diperlukan agar sedari dini mereka dapat memahami sebuah demokrasi dalam kerangka sistem pemerintahan negara, yaitu bagaimana kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat baik yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan beretika.

Karena itu DPR RI telah berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja setiap tahun baik di tingkat SMA maupun Tingkat Mahasiswa, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman para remaja tentang bagaimana proses demokrasi dan proses politik bekerja di Negara kita. “Melalui kegiatan Parlemen Remaja ini diharapkan para remaja dapat lebih mengenal DPR RI sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi politik baik di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan,” kata Nining Indra Shaleh.

Disamping itu kegiatan parlemen remaja juga diharapkan mampu mendidik remaja yang kritis dan mengetahui tentang proses politik di Indonesia sehingga akan memperkuat partisipasi publik dalam proses politik selain untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam hal : memahami tata cara berparlemen dan praktek debat politik di DPR-RI, meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang demokrasi, memberikan pemahaman kepada remaja tentang bagaimana cara menyuarakan aspirasi dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat.

Parlemen Remaja 2011 adalah Kegiatan Parlemen Remaja yang kelima kalinya diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Parlemen Remaja tahun ini diselenggarakan untuk tingkat mahasiswa dengan bekerjasama dengan Universitas Indonesia terutama



Peserta Parlemen remaja 2011 tingkat mahasiswa berfoto bersama dengan sekjen DPR Nining Indra Saleh

dalam rekrutmen peserta. Jumlah peserta yang mengikuti Parlemen Remaja kali ini adalah 125 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Para peserta tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa terpilih yang telah lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.

Pada saat seleksi, para peserta diwajibkan mengirimkan essay tertulis dengan tema "Format Ideal Parlemen di Indonesia". Dari 351 mahasiswa yang mengirimkan essay untuk diikuti dalam seleksi, terpilih 125 mahasiswa

dengan essay terbaik, yang berhak menjadi peserta Parlemen Remaja Tingkat Mahasiswa 2011.

Kegiatan parlemen remaja tingkat mahasiswa kali ini diselenggarakan selama (5) lima hari dari tanggal 2 sampai dengan 6 Desember 2011, dan dibagi menjadi 3 sesi yakni sesi orientasi, sesi simulasi dan city tour.

Pada saat sesi orientasi, para peserta diberikan materi mengenai : Tugas, Fungsi, Wewenang dan Rencana Strategis DPR-RI; Mekanisme Persidangan, Pengambilan Keputusan dan Proses

Pembuatan Undang-Undang; Peran DPR dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan; Pembahasan RUU Intelijen Negara; serta Mekanisme dan Proses Pembahasan Anggaran.

Dan pada saat sesi simulasi, yang rencananya akan diadakan hari ini, para peserta akan melakukan simulasi Rapat Kerja dan Rapat Paripurna DPR dengan topik: "Pembahasan RUU Intelijen Negara"; "Pembahasan Kebijakan Anggaran Pendidikan"; serta "Evaluasi Anggaran Lebaran 2011". (as) foto:parle

Lima Kementerian Beri Masukan RUU Ormas

Lima Kementerian RI antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memberikan masukan bagi Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11)

Dalam Rapat Kerja Pansus RUU Ormas yang dipimpin Ketua Pansus Abdul Malik Haramain, Rusli Wahid Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial mengharapkan RUU Ormas mengatur hal-hal yang bersifat strategis tetapi komprehensif terhadap ormas baik ormas yang dibentuk dan lahir di Indonesia maupun ormas asing yang beroperasi dalam wilayah NKRI, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Rusli mengusulkan agar substansi RUU Ormas menekankan optimalisasi peran dan fungsi Kementerian/Lembaga yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kolaborasi, sinergi dan kemitraan dengan ormas.

meningkatkan partisipasinya dalam mengawasi kiprah organisasi kepemudaan.

Menurut Rusli pengawasan bagi ormas kepemudaan asing dilakukan melalui pengawasan terpadu. Terkait dengan kemenpora, yang dapat dilakukan adalah melakukan peman-



Pimpinan Rapat Kerja Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain (tengah)

tauan menggunakan infrastruktur yang dimiliki. Sedangkan dalam penindakan diserahkan kepada aparat atau instansi yang berwenang. Kemenpora tidak memiliki kewenangan dalam proses pengawasan. Adapun tugas pemantauan dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemberdayaan.

Sedangkan Lukita Dinarsyah Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyarankan da-

lam pembahasan RUU Ormas disinkronkan dengan Undang-undang lain yang berkaitan dengan Organisasi Masyarakat.

Lukita memberikan usul perlunya satu pintu registasi bagi seluruh ormas baik ormas yang dibentuk dan lahir di Indonesia maupun ormas asing yang beroperasi di Indonesia. (sc) foto:ry/parle

Ketua DPR Marzuki Alie Resmi Menjadi Presiden PUIC

Perhatian 51 negara yang tergabung dalam Parliament Union of the OIC Member State - PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara Organisasi Islam) akan terfokus kepada Indonesia karena pada tahun 2012, Ketua DPR Marzuki Alie secara resmi akan menjabat sebagai Presiden PUIC.



Ketua DPR RI saat menjadi pembicara di acara Seminar PUIC Palembang

Beban pertama adalah menyelenggarakan konferensi di Palembang, Sumatera Selatan 24 - 31 Januari 2012 yang akan datang.

“Untuk diketahui saya terpilih menjadi Presiden PUIC pada sidang keenam di Kampala, Uganda. Kita mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Arab. Perkembangan terakhir perubahan statuta, sidang PUIC akan lebih intens dilaksanakan tiap tahun, maka jabatan presiden untuk periode 1 tahun akan kita manfaatkan sebaik-baiknya,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka Seminar ‘Kepemimpinan Indonesia di Parliamentary Union of OIC Member State - PUIC Antara Tantangan dan Harapan’, di Palembang, Sumsel, Kamis (22/12/11).

Ia kemudian menjelaskan sebagai anak bangsa yang berasal dari Sumsel mengusulkan pelaksanaan Konferensi di Palembang. “Tadinya ada yang meragukan Palembang karena kesiapan sarana prasarana, SDM, namun setelah berhasil melaksanakan Sea Games kami semakin yakin Sidang PUIC dapat berjalan sebagaimana kita rencanakan,” jelasnya

disambut tepuk tangan peserta seminar yang sebagian besar mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Sumsel.

Pada bagian lain Ketua DPR menyebut sikap ekstrim dan berlebihan dalam ber-Islam, mengabaikan konsep Syura dan menggantinya dengan otoritarian dan kesewenang-wenangan, perpecahan antar umat islam adalah beberapa faktor penyebab tertinggalnya dunia islam dari bangsa-bangsa lain.

Faktanya dari total 1 miliar lebih umat sebagian masih dililit paradigma sempit dalam ber-Islam, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, buta huruf, konflik sektarian, instabilitas dan masalah-masalah lain.

“Dalam konteks ini Indonesia memiliki potensi untuk membuktikan ajaran Islam yang luhur, santun dan humanis, mempraktikkan konsep Syura dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang berhasil menerapkan prinsip demokrasi serta mencermati perkembangan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, DPR RI dapat menjadikan momentum sebagai Presiden PUIC untuk mendorong tumbuh kembangnya demokrasi sesuai nilai-nilai Islam,” imbuhnya.

Secara praktikal Indonesia mempunyai kisah sukses dalam menyelenggarakan pemilihan umum, ini menjadi pembuktian Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan seperti yang ditudingkan banyak pihak. Lebih lanjut menurut Marzuki, DPR nantinya ingin menjadikan PUIC lebih inklusif, tidak sekedar milik

negara-negara muslim, tetapi juga negara-negara atau organisasi diluar Islam yang semisi dan sevisi dengan PUIC.

Sementara itu ketua BKSAP DPR RI Hidayat Nurwahid menyebut ditunjuknya Palembang sebagai tempat pelaksanaan Konferensi PUIC bermakna strategis.

Dalam satu literatur arab yang ditulis oleh seorang ulama ternama disebutkan komunikasi lewat surat menyurat telah berlangsung antara Raja-raja di kerajaan Sriwijaya dengan Khalifah zaman Bani Umayyah di Damaskus. “Dalam literatur disebutkan Raja Sriwijaya menghendaki agar hubungan antara Kerajaan Islam di Damaskus dengan Kerajaan Sriwijaya diperkuat. Alasannya di kawasan Sriwijaya sudah ada masyarakat yang memeluk agama yang sama dengan yang dipeluk dengan khalifah di Damaskus, artinya Islam sudah hadir di Nusantara saat itu,” paparnya.

Fakta ini menurut politis PKS penting, karena itu berarti di Sumsel agama Islam sudah lebih awal berkembang dibanding Aceh. “Justru dari Sumsel inilah Islam menyebar ke seluruh Indonesia.” Itulah sebabnya DPR berani menjadi ketua Parlemen OKI dan kemudian memberikan kehormatan kepada Sumsel menjadi daerah yang menyelenggarakan konferensi.” Kita berharap pada saatnya nanti, kalau sekarang kita lihat 11 bendera negara Asean peserta SeaGames, nanti yang berkibar 51 bendera negara OKI menyemarakkan kota Palembang,” demikian kata Hidayat.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel, Effendy Yusuf menyatakan siap menyukseskan konferensi PUIC. “ini luar biasa kesempatan jadi tuan rumah datang dari Pak Marzuki Alie, putra Sumsel. Dengan semangat Sriwijaya, kita berharap kebesaran jiwa masyarakat untuk suksesnya konferensi ini,” tegasnya. Ia juga menyampaikan harapan kegiatan konferensi dapat menggairahkan ekonomi masyarakat setempat. “Kalau songket yang harganya jutaan diborong peserta konferensi pasti akan berarti bagi masyarakat,” ujarnya. (iky/foto:ig)

BKSAP Terima Kunjungan Studi Banding Parlemen Afganistan

Walaupun baru saja menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dan baru melewati dua kali pemilu Republik Islam Afganistan ternyata memiliki prestasi tersendiri. Hasil pemilu terakhir presentase keterwakilan perempuan di parlemen mencapai angka 28 persen, jauh melebihi Indonesia yang pada pemilu 2009 lalu anggota DPR perempuan hanya mencapai 17 persen.

“Wah ternyata parlemen Afganistan telah melebihi kita ya. Secara kuantitas jumlah anggota parlemen kita lebih banyak tapi keterwakilan perempuan kita tertinggal,” kata Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Hidayat Nurwahid, saat menerima kunjungan studi banding Parlemen Afganistan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/11).

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Ketua Senat – Afghan National Assembly, Fazal Hadi Muslimyar menjelaskan kunjungan studi banding kali ini merupakan agenda pada masa reses yang berlangsung dari tanggal 6 Desember sampai 20 Januari 2012. Ia menyampaikan penghargaan karena kunjungan bilateral ini mendapat sambutan yang sangat baik dari parlemen Indonesia, baik DPR, MPR maupun DPD. Negaranya saat ini menurutnya membutuhkan dukungan dari negara sahabat untuk bangkit kembali pasca perang saudara dan pendudukan tentara asing.

Sementara itu senator Echsanullah Bayet menyampaikan undangan lewat BKSAP DPR kepada pengusaha di Indonesia untuk ber-investasi di Afganistan. Salah satu peluang menarik adalah akan dibukanya tender eksplorasi minyak dengan perkiraan potensi mencapai 500 miliar barel. “Kita ada tender minyak pada bulan Maret 2012 yang akan datang, kita undang pengusaha dari seluruh dunia, kalau bisa pengusaha Indonesia bisa hadir. Minyak ini kandungannya 500 miliar barel. Kita berharap pengusaha lain juga datang investasi di bidang masing-masing kita akan siapkan fasilitasnya,” katanya sambil berpromosi.

Menjawab hal ini anggota BKSAP Atte Sugandi menjelaskan Indonesia memiliki perusahaan negara Pertamina yang sudah berpengalaman dalam



Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid (tengah) saat menerima kunjungan studi banding Parlemen Afganistan

melakukan eksplorasi di negara lain seperti di Libya, Sudan, Qatar dan beberapa negara lain. “Kalau ada kesempatan eksplorasi di Afganistan, kenapa tidak ditindaklanjuti. Pertamina dan anak perusahaannya mampu melakukan eksplorasi di luar negeri,” tandasnya.

Atte yang juga anggota Komisi VI ini menyebut sampai tahun 2010 lalu tercatat sudah 120 warga Afganistan mengikuti program capacity building di bidang pertanian, perikanan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat dan bidang lain di Indonesia. Ia berharap dukungan ini dapat berlanjut ke bidang lain seperti pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah kepada pengusaha kecil di Afganistan.

Pada bagian lain anggota BKSAP dari FPKS, Buchory Yusuf menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar negara bukan hanya G to G – government to government tapi perlu diperkuat dengan P to P – parlement to parlement yang kemudian menjadi lebih dekat menjadi people to people. Ia menyebut ada dua hal menarik yang

dapat dilakukan segera, yaitu percampuran budaya dan pertukaran pendidikan. “Mahasiswa Afganistan dapat kuliah di Universitas Islam atau pendidikan tinggi lain di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak,” lanjutnya.

Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid berharap kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan antar parlemen dalam upaya meningkatkan demokrasi yang diyakini sebagai salah satu cara efektif untuk mengatasi terorisme, ekstrimisme, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Ia juga menghargai undangan untuk berkunjung ke Parlemen Afganistan. Sambil bergurau Hidayat juga menyebut anggota Parlemen Afganistan dipastikan akan betah di Indonesia karena disini tersedia banyak nasi Kabuli. “Di Indonesia anda pasti akan sangat kerasan karena disini banyak tersedia nasi kabuli, makanan khas yang berasal dari kata Kabul ibukota Afganistan,” demikian Hidayat mengakhiri pertemuan hangat parlemen dua negara tersebut. (iky) foto:tim parle

Komisi V Dan Pemerintah Sepakat Tidak Melakukan Perubahan UU Pelayaran



Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow

Keputusan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat melaporkan hasil pembahasan RUU dimaksud pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (13/12) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Yasti mengatakan, dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Menteri ESDM dan Menkumham tanggal 10 Maret 2011 telah diputuskan dua hal penting yaitu, Komisi V DPR meminta Pemerintah untuk mengubah Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terkait dengan ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, selambat-lambatnya tanggal 7 April 2011.

Keputusan berikutnya yang diambil

Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk tidak melakukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

adalah, Komisi V DPR sepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlu tidaknya mengubah Undang-undang tentang Pelayaran untuk menindaklanjuti keputusan rapat kerja tersebut.

Pada tanggal 4 April 2011 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tersebut dinilai telah mampu mengakomodasi permasalahan yang ada saat ini, sehingga Komisi V DPR sepakat untuk mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri ESDM dan Menkumham dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Pembahasan Akhir Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 8 Desember 2011.

Dalam rapat kerja Pengambilan Keputusan Pembahasan Akhir Pembicaraan Tingkat I telah disepakati UU Pelayaran tidak dilakukan perubahan.

Selain itu, Komisi V DPR meminta Pemerintah untuk mengkaji Pasal 206a ayat (3) huruf d,e,f dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Penggunaan Kapal Asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyampaikan pandangan bahwa Pemerintah menyetujui tidak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan Pemerintah terha-

dap pelaksanaan penerapan asas cabotage sebagai pelaksanaan UU Pelayaran, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya telah dapat menjawab kebutuhan kapal asing yang akan digunakan untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.

PP No. 22/2011 telah mengatur kapal asing yang melakukan kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia dapat tetap melakukan kegiatan tersebut sepanjang kapal tersebut belum tersedia atau belum cukup tersedia, wajib mendapat ijin dari menteri.

Kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan survey minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang operasi lepas pantai pengerukan dan salvage serta pekerjaan bawah air.

Sementara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 mengatur jangka waktu kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang atau barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri.

Amir menambahkan, menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja tanggal 8 Desember lalu, Pemerintah akan melakukan evaluasi dan pengkajian khususnya terhadap pengoperasian kapal asing untuk kegiatan penunjang operasi lepas pantai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air, sebagaimana diatur dalam Pasal 206a ayat (3) huruf d,e dan f Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011. (tt) foto:tim parle

DPR Desak Pemerintah Susun PP Tentang CSR

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendesak Pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait Program Corporate Social Responsibilites (CSR), pasalnya meskipun sudah ada UU-nya namun payung hukum teknisnya ampai sekarang masih belum ada sehingga membingungkan bagi Pemda, pengusaha maupun pelaku CSR.

“Seringkali program CSR ini dijadikan alat bargaining, dan di politisasi untuk kepentingan sepihak,”ujarnya saat menerima ratusan anggota Corporate Forum Community Development (CFCD) di Gedung Operation Room, Kamis, (15/12).

Menurut Taufik, DPR sangat mendukung sekali adanya peningkatan program CSR bagi masyarakat sekitar pertambangan. “DPR mendukung program plasma yang dilakukan CFCD di berbagai daerah, dan kita mengharapkan CFCD bersama dengan DPR memberikan masukan berapa persentase Community Development yang dapat diberikan bagi masyarakat sebagai bentuk penyanggah lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Taufik menyadari program CSR seringkali tidak tepat sasaran dan mengurangi makna dari pertanggungjawaban sosial misalnya saja program yang diperuntukkan bagi keamanan, padahal seharusnya menyusun program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

Dia menambahkan, perusahaan dapat memberikan dukungannya dalam aspek tenaga kerja, fasilitas publik maupun umum bagi masyarakat sekitar bisnisnya. “Prinsipnya kita memberikan apresiasi terhadap program yang telah dilakukan oleh CFCD dan kita harapkan jangan terjebak ceremonial semata tetapi aksi nyata yang mampu meminimalisir dan menyamakan persepsi,”ujarnya.

Sekarang ini, perlu dibangun kesadaran bersama dari para pengusaha dimana mereka telah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada namun juga jangan lupa memberikan aspek



Suasana pertemuan antara DPR RI dengan Corporate Forum Community Development (CFCD)

CSR secara universal kepada masyarakat “selain itu perlu disusun UU terkait bagi hasil daerah yang menghasilkan devisa bagi Indonesia, dan ini harus dalam bentuk UU bila daerah tersebut memberikan kontribusi maka pemerintah memberikan kembali keuntungan itu untuk masyarakat,”katanya.

Menurutnya. Banyak sekali PR yang dihadapi saat ini, misalnya saja CSR itu sering digiring ke arah politis. karena itu, pesan Taufik, seluruh elemen masyarakat harus berpikir dalam konteks politik sosial kemasyarakatan secara universal. “Sebagai pimpinan Dewan saya termasuk yang tidak setuju bila program CSR ini dimasukkan dlm batang tubuh APBD, sebelum dituntaskannya PP sebagai turunan UU nya sehingga ada kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,”ujarnya.

Sementara anggota Komisi XI DPR Laurens Bahang Dama (F-PAN) meyakini ada UU PT No. 40 tahun 2007

namun tidak dijelaskan berapa persentase yang harus dikeluarkan Perusahaan untuk program CSR, Sementara didalam UU BMN dijelaskan bahwa 2 persen keuntungan perusahaan itu harus diperuntukkan bagi kemajuan masyarakat. Karenatidak adanya aturan yang jelas bagi Perusahaan maka seringkali perusahaan menganggap ini bukan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan persentase yang besar dalam bentuk program Community development (CD) bagi masyarakat.

Dia melanjutkan, bahkan seringkali Program CSR dipakai oleh oknum pejabat BUMN untuk entertain golongan saja. “Semoga saja dibawah Meneg BUMN Dahlan Iskan segera terlihat perubahan di BUMN. artinya kita mengharapkan dana 2 persen itu diperuntukkan buat kesejahteraan masyarakat Indonesia,”ujar politisi dari Dapil NTT ini.

Laurens juga mengkritisi daya saing produk dalam negeri yang masih rendah, terbukti 53 persen produk dalam negeri tidak memiliki daya saing dibandingkan produk luarnegeri. Karena itu, lanjutnya DPR akan melakukan proteksi ketat jangan sampai UMKM-mati karena biaya semakin tinggi sehingga produknya tidak bisa dekspor

yang berdampak semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Ketua terpilih CFCD Suwandi mengatakan, organisasi CFCD merupakan organisasi non profit dan setiap anggota atau perusahaan yang tergabung tidak membayar iuran setiap bulan. Namun, pihaknya mengaku tetap komit dan bersama-sama menjalankan pro-

gram Community development sebagai bentuk tanggung jawab sosial pribadi. "Kita mengharapkan DPR bisa mendukung program percepatan CSR ini bagi seluruh perusahaan, meskipun regulasi PPnya belum ada kita tetap menjalankan program sesuai kerangka kerja yang ada," katanya. (SI) foto: tim parle

Komisi V Dukung Boarding Pass di KA

Komisi V DPR RI mendukung diberlakukannya sistem boarding pass bagi calon penumpang kereta api (KA). Sistem itu dinilai bisa mengontrol masyarakat yang akan naik KA sekaligus mencegah praktik percaloan tiket KA.



Komisi V DPR mengunjungi stasiun Tugu Yogyakarta dan bertemu jajaran PT Kereta Api Indonesia

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Bambang Sutrisno saat memimpin pertemuan dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI), Senin (12/12) di Stasiun Tugu Yogyakarta.

Menurut Bambang, penggunaan sistem boarding pass ini akan menambah kenyamanan dan keamanan pengguna KA. "Kami mendukung karena menjadikan masyarakat aman dan nyaman," kata politisi Dapil Jawa Tengah VI ini.

Namun Bambang mengingatkan, kesiapan pemberlakuan sistem baru ini

harus disempurnakan mengingat tidak semua stasiun di seluruh Pulau Jawa ini kondisinya sama.

Pemberlakuan sistem itu, juga perlu memperhatikan beberapa fasilitas yang memang perlu disediakan.

Fasilitas yang perlu ada menurut Bambang, perlu adanya ruang tunggu, mushala, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendukung untuk mereka yang memiliki kekurangan dan lanjut usia. "Untuk masyarakat yang memiliki kekurangan fisik supaya disiapkan, sudah menjadi aturan dunia bangunan publik harus menyediakan fasilitas untuk penyan-

dang cacat," tegasnya. Komisi V juga menyoroti kebijakan pembatasan penumpang oleh PT KAI (persero).

Kebijakan itu diharapkan tidak memicu kasus calon penumpang kereta yang tidak terangkut. Karena itu, Bambang meminta Dirjen Perkerataapian melakukan langkah antisipasi dengan berupaya menambah gerbong atau memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak terangkut.

Kepala Stasiun Tugu Asdo Artrivianto mengatakan sistem boarding pass ini sudah mulai diberlakukan di stasiun-stasiun tertentu di seluruh Indonesia pada 1 Oktober lalu. Sistem tersebut seperti pemberlakuan penumpang di bandara, untuk sarana dan prasarana memang harus ada yang di luar dan sebagian lagi di dalam.

"Memang harus bertahap dan akhir 2011 atau awal 2012 ini kita akan mengarah ke sana," paparnya.

Menurut Asdo, 2012 nanti pihaknya akan menyediakan kereta troli di stasiun karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai belum tersedianya troli di stasiun. Sehingga penumpang terpaksa menggunakan jasa kuli. Jika troli ini sudah dipersiapkan, akan memudahkan penumpang untuk membawa sendiri barang-barangnya.

Asdo membenarkan, sistem boarding pass ini memang belum dapat diterapkan di semua stasiun mengingat kondisi stasiun yang berbeda-beda dan tentunya ini dapat dilakukan secara bertahap. (tt)

DPR Sosialisasikan PUIC Palembang Kepada Para Dubes

DPR lakukan sosialisasi penyelenggaraan Parliamentary Union of OIC (PUIC) ketujuh di Palembang kepada 51 negara dan 14 observers yang diwakili oleh para Dubesnya yang ada di Indonesia.

“Pertemuan ini dalam rangka sosialisasi PUIC and related meetings di Kota Palembang-Sumsel pada tanggal 24-31 Januari 2012 mendatang,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dihadapan para Dubes, di Gedung Pustakaloka, Selasa, (13/12).

Menurut Marzuki, Organisasi PUIC berdiri pada tanggal 17 Juni 1999 dan merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun Parlemen dari negara-negara anggota OKI. Partisipasi Indonesia dalam PUIC sudah dimulai ketika Indonesia turut membidani kelahiran organisasi ini di Teheran-Iran.

“Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan juga negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah mendapat mandat dari negara-negara anggota PUIC dalam Sidang PUIC di Kampala – Republik Uganda pada tanggal 24 - 31 Januari 2010, sebagai Presiden Konferensi PUIC untuk masa jabatan tahun 2012 – 2013 dan menjadi tuan rumah The 7th PUIC Conference and related meetings,” ujarnya

Dia menambahkan, Indonesia menyatakan komitmen yang kuat untuk berkiprah dalam organisasi PUIC karena Indonesia sangat ingin mendorong PUIC menjadi organisasi parlemen yang diperhitungkan di kancah internasional khususnya dalam kaitan dengan permasalahan umat Islam, dan keberadaan PUIC dirasakan manfaatnya oleh anggotanya.

Sebagai Presiden Konferensi PUIC periode 2012–2013 dan Tuan Rumah Konferensi PUIC untuk yang pertama kalinya diselenggarakan di wilayah Asia Tenggara, lanjutnya negara Indonesia menanggapi penting konperensi ini untuk dihadiri oleh semua anggotanya. Saat ini, jumlah anggota PUIC adalah 51 negara dan 14 observers. “Urgensi konferensi ini semakin meningkat manakala PUIC maupun OKI kerap kali dianggap sebagai organisasi yang identik dan mewakili suara dan



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat berpidato pada acara sosialisasi PUIC Palembang kepada para Dubes.

aspirasi lebih dari 1 miliar umat muslim di dunia. Dengan pandangan tersebut, adalah sangat penting bagi PUIC untuk dapat menjawab tantangan-tantangan yang mencuat atas eksistensi umat Islam,” katanya.

PUIC juga selayaknya, menjadi solusi dari berbagai fenomena global yang terjadi seperti makin dinamisnya situasi politik di sejumlah negara-negara Islam, hingga menguatnya kebutuhan untuk menjalin solidaritas dan mempererat kerja sama yang lebih luas dengan kaum muslim minoritas di negara-negara Eropa dan negara Barat lainnya. Untuk itulah, Konferensi PUIC di Palembang tahun 2012 yang akan datang penting untuk dilaksanakan melalui partisipasi aktif dan penuh dari seluruh anggotanya.

Marzuki mengatakan, Palembang merupakan kota kelahiran dirinya dan Sudah menjadi komitmen DPR untuk mengenalkan semua potensi wilayah Indonesia kepada dunia luar, sehingga kami menggunakan berbagai kota di Indonesia sebagai venue dari berbagai sidang yang diselenggarakan oleh DPR RI.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

“Palembang sebagai tempat konferensi PUIC mendatang, telah memiliki tempat sidang (conference room) yang memadai bagi penyelenggaraan konperensi internasional, Hotel standar internasional (bintang 5 atau 4) dan international airport (Sultan Mahmud Badaruddin II Airport), dengan jalur penerbangan yang cukup banyak. Hotel-hotel di Palembang kini juga tengah berbenah diri untuk menyambut tamu dari Negara PUIC,” ujarnya.

Bahkan, baru-baru ini Palembang juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sea Games yang telah berjalan sukses sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan untuk kelancaran sidang PUIC. Selain itu kami juga akan menyiapkan kesempatan bagi para delegasi untuk mengunjungi tempat pariwisata sehingga lebih mengenai kebudayaan Palembang. (si)foto:tim parle



Segenap
Pimpinan dan Anggota DPR RI
Beserta Keluarga Besar Setjen DPR RI
Mengucapkan

Selamat Natal 2011
& Tahun Baru 2012

